

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR PERKEBUNAN: KASUS TEH DAN SAWIT

Rohayati Suprihatini, Bambang Drajat dan Undang Fajar

*Lembaga Riset Perkebunan Indonesia
Jl. Salak 1-A Bogor*

PENDAHULUAN

Ekspor komoditas perkebunan Indonesia sebagian besar masih dalam bentuk komoditas primer. Sebagai contoh, volume ekspor kopi Indonesia 97,7 persen masih dalam bentuk biji kopi. Demikian pula volume ekspor kakao 80,4 persen masih dalam bentuk biji kakao dan untuk ekspor teh 95,6 persen masih dalam bentuk teh curah. Pada minyak kelapa sawit, kondisinya sudah lebih baik karena volume ekspor dalam bentuk olahan telah mencapai 53,7 persen dari total volume ekspor, namun sebagian besar hanya berupa minyak goreng (olein) yang bernilai tambah rendah (Ibnusantosa, 2000).

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan devisa negara, menjangkir nilai tambah, memperkuat struktur ekspor, mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas primer perkebunan, dan mencegah penurunan nilai tukar, sertaantisipasi terhadap kejenuhan pasar komoditas primer perkebunan di masa mendatang perlu pengembangan industri perkebunan ke arah hilir. Pengembangan agroindustri perkebunan ke arah hilir secara umum memiliki beberapa keunggulan karena efek penggandaannya (*multiplier*) yang relatif besar, efek distribusinya yang relatif baik, komponen impor yang kecil, bertumpu pada sumberdaya yang dapat diperbaharui, pemicu pertumbuhan daerah baru, dan memperkuat struktur ekspor melalui pola diversifikasi (Ardjanggi, 1987; Baharsyah, 1991).

Efek penggandaan yang besar tercermin dari tingkat keterkaitan yang kuat, baik yang bersifat keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Efek distribusi agroindustri yang baik disebabkan sekitar 60 persen nilai tambah agroindustri adalah dalam bentuk upah (Baharsyah, 1991). Demikian pula, agroindustri hanya mempunyai komponen impor sekitar 17 persen (Harahap, 1987).

Peran yang cukup penting lainnya dari agroindustri khususnya agroindustri hilir perkebunan dalam mendukung sektor pertanian adalah dalam upaya mengurangi fluktuasi harga produk primer pertanian dan mencegah penurunan nilai tukar produk pertanian (Suratin *et al.*, 1993). Fluktuasi harga yang tinggi serta penurunan nilai tukar komoditas primer perkebunan terutama berpangkal dari inelastisnya permintaan dan penawaran komoditas primer perkebunan. Dengan mengolah produk primer perkebunan melalui agroindustri,

panawaran dan permintaan produk perkebunan menjadi lebih elastis sehingga diharapkan mengurangi fluktuasi harga dan mencegah penurunan nilai tukar hasil perkebunan.

Output dari pembangunan agroindustri adalah perolehan nilai tambah yang signifikan atas input teknologi yang diberikan. Semakin canggih teknologi yang digunakan untuk melakukan diversifikasi produk dari bahan baku, maka semakin tinggi pula nilai tambah produk diversifikasi tersebut serta memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga komoditas awalnya (Gumbira-Sa'id, 2001). Oleh karena itu, pengembangan agroindustri yang lebih berorientasi ke arah hilir merupakan strategi yang harus dilaksanakan untuk beberapa jenis komoditas perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk hilir yang berorientasi ekspor.

Dalam rangka mendorong pengembangan industri hilir perkebunan di Indonesia, telah dilakukan beberapa penelitian antara lain penelitian prospek industri barang jadi karet di Indonesia (Honggokusumo, 1994); prospek pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit (Lubis dan Naibaho, 1995); prospek produk-produk oleokimia asal sawit (Suprihatini *et al*, 2000); (Suprihatini dan Gumbira-Sa'id, 2001), (Suprihatini, 2001), dan kajian penilaian kemampuan penguasaan teknologi di industri hilir teh (Suprihatini dan Bambang, 2000). Namun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan masih belum mampu menjawab secara komprehensif masalah “mengapa industri hilir perkebunan di Indonesia tidak berkembang?”. Hal ini dimungkinkan karena penelitian-penelitian tersebut lebih memfokuskan pada penelitian untuk mengetahui prospek pasar dan prospek pengembangan industri hilir perkebunan di Indonesia, sedangkan identifikasi masalah pokok dari kurang berkembangnya industri hilir perkebunan di Indonesia (walaupun pasar dan investasinya sangat prospektif) masih belum menjadi fokus perhatian atau baru dilakukan secara parsial dengan metode yang terbatas pada pendekatan kualitatif.

Tulisan ini membahas dua aspek, yaitu : (1) Informasi faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap percepatan pengembangan industri, dan (2) Usulan kebijakan percepatan pengembangan industri hilir perkebunan untuk masa 5 – 10 tahun mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (1) melakukan *expert meeting*; dan (2) melakukan survey industri. *Expert meeting* dilakukan di Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) pada tanggal 2-3 Oktober 2003 dan dihadiri oleh 15 ahli yang mewakili para pelaku industri hilir

perkebunan, pihak pemerintah, para peneliti dan akademisi, serta pengamat ekonomi. Kelima belas *experts* yang berpartisipasi dalam *expert meeting* tersebut terdiri dari ketua Asosiasi Teh Indonesia (ATI), ketua Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (APOLIN), ketua Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), 6 orang mewakili para pelaku industri hilir perkebunan terkemuka di Indonesia, dan 5 orang yang mewakili pihak pemerintah (Depperindag, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian dan Lembaga Penelitian). Pada penelitian ini mengambil kasus pengkajian pada industri hilir teh dan sawit sebagai representasi dari industri hilir perkebunan secara umum.

Survei untuk konfirmasi hasil dari *expert meeting* dilakukan terhadap 12 perusahaan yang mewakili para pelaku industri hilir sawit dan teh, Kantor Pajak Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat II, Kantor Wilayah Pajak Sumatra Utara, Badan Investasi dan Promosi Provinsi Sumatra Utara, Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindag Provinsi Sumatra Utara, Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Utara, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, dan satu orang ekonom dari Universitas Pajajaran.

Metode Analisis Data

Analisis prospektif digunakan untuk menentukan faktor-faktor dan kebijakan kunci dalam mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui *expert meeting* dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan industri hilir perkebunan. Beberapa tahap dalam melakukan analisis prospektif (CRIEC, 2002) adalah sebagai berikut: (a) Mendefinisikan sistem dan lingkupnya; (b) Mengidentifikasi faktor-faktor dan mendefinisikannya; (c) Mendiskusikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem; (d) Melakukan analisis keterkaitan antarfaktor (langsung dan tidak langsung); (e) Menentukan faktor penentu (yang memiliki pengaruh tinggi, namun ketergantungannya terhadap faktor lain kecil); (f) Melakukan analisis kondisi faktor di masa depan; (g) Menentukan skenario (kondisi faktor) yang paling mungkin terjadi di masa depan; (h) Menganalisis implikasi skenario terhadap sistem; dan (i) Merumuskan kebijakan-kebijakan agar dampak positif terealisasi dan sebaliknya dampak negatif dapat diantisipasi.

Jenis industri hilir yang dikaji terbatas pada industri hilir teh dan sawit. Pemilihan industri hilir teh didasarkan pada fakta bahwa ekspor teh Indonesia baik volume maupun nilai ekspor terus menurun sejak tahun 1993. Selain itu, ekspor teh Indonesia dalam bentuk produk hilir kontribusinya masih sangat rendah (6,1% dari total volume ekspor). Pemilihan industri hilir sawit didasarkan pada kenyataan bahwa industri tersebut sudah lebih berkembang di Indonesia dibandingkan dengan industri hilir komoditas perkebunan lainnya. Oleh karena itu

perlu dijadikan contoh sukses dari keberhasilan industri hilir perkebunan di Indonesia.

FAKTOR DETERMINAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN

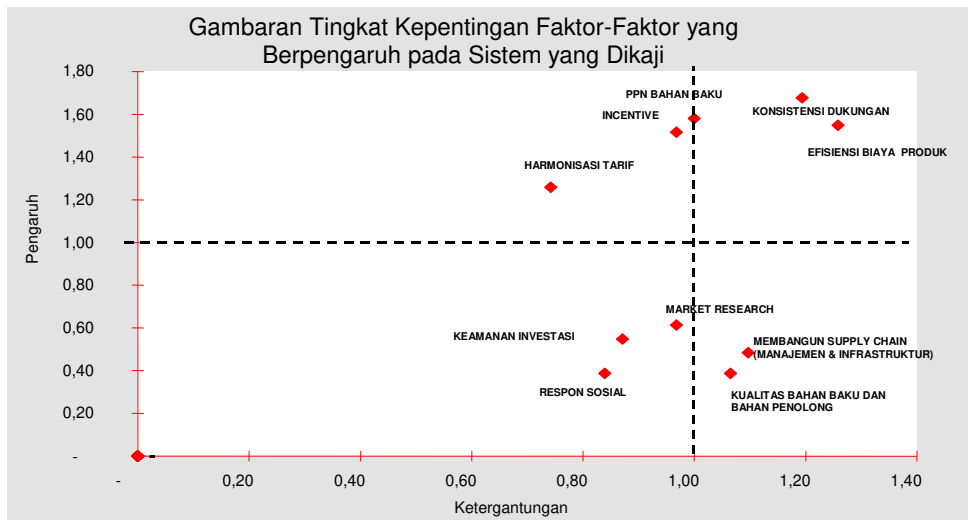
Dari hasil *experts meeting*, pada tahap awal telah diidentifikasi 34 faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan. Namun setelah dilakukan seleksi melalui diskusi yang mendalam telah diidentifikasi 10 faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan (Tabel 1).

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Percepatan Pengembangan Industri Hilir Perkebunan di Indonesia

Faktor	Definisi
Pajak Pertambahan Nilai	PPN yang dikenakan di setiap rantai penyerahan barang mulai dari bahan baku hingga produk-produk hilirnya.
Insentif Investasi	Keringanan pajak untuk investasi di industri hilir perkebunan di Indonesia
Harmonisasi Tarif	Pengenaan tarif impor yang berbeda untuk produk hilir dan bahan baku.
Konsistensi Dukungan	Keberpihakan/prioritas terhadap pengembangan industri hilir dari waktu ke waktu tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan (kabinet)
Efisiensi Biaya Produksi	Struktur dan efisiensi biaya produk hilir, minimisasi pungutan
Keamanan Investasi	Keamanan investasi, termasuk hubungan antara buruh dengan perusahaan
Penelitian Pasar	Mencakup penyediaan informasi pasar, <i>market intelligence</i> , akses pasar dan upaya promosi.
Kualitas Bahan Baku dan Bahan Penolong	Mencakup konsistensi dan kontinuitas mutu bahan baku dan penolong
Respon Sosial	Tanggapan masyarakat terhadap pembangunan industri hilir dalam bentuk kebutuhan akan biaya sosial dan bina lingkungan
<i>Supply Chain Management</i> dan Infrastruktur	Membangun jaringan dari produksi hingga distribusi baik manajemen dan infrastruktur dengan pembiayaan swasta dan fasilitasi dari pemerintah dan asosiasi

Dari 10 faktor tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor kuncinya yaitu faktor yang memiliki pengaruh sangat kuat (*influence*) dalam percepatan pengembangan industri hilir perkebunan, namun memiliki ketergantungan yang

rendah terhadap faktor lainnya atau lebih *independent*. Penentuan faktor kunci dilakukan dengan menggunakan analisis keterkaitan antar faktor. Hasil analisis keterkaitan antar faktor disajikan pada Gambar 1. Dari gambar tersebut diketahui bahwa dari kesepuluh faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan, ternyata hanya 4 faktor kunci yaitu (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (2) insentif investasi; (3) harmonisasi tarif, dan (4) konsistensi dukungan pemerintah, yang merupakan faktor-faktor kunci karena memiliki pengaruh total yang tinggi namun ketergantungannya pada faktor lain yang rendah. Dengan demikian, percepatan pengembangan industri hilir perkebunan di Indonesia betul-betul sangat tergantung pada kebijakan dan *political will* dari pemerintah Indonesia.



Gambar 1. Hasil Analisis Pengaruh Antar Faktor

Kondisi Faktor Kunci dan Skenario ke Depan

Skenario merupakan gabungan dari beberapa kondisi faktor-faktor kunci di masa depan. Setelah menghilangkan adanya inkompatibilitas yaitu gabungan kondisi faktor-faktor yang tidak mungkin dapat terjadi secara bersama-sama, kemudian dihasilkan 6 skenario yang mungkin terjadi di masa depan.

Pemilihan skenario yang paling mungkin terjadi pada masa 5 hingga 10 tahun mendatang dipilih melalui teknik penjumlahan skor dari setiap *expert* di setiap skenario. Dari jumlah skor tersebut, diketahui bahwa skenario yang paling mungkin terjadi di masa 5 – 10 tahun mendatang adalah skenario 1 (jumlah skor 16), yaitu akan terjadi kondisi (1) PPN akan tetap dipungut seperti sekarang atau tidak ada perubahan terhadap kebijakan PPN (*status quo*), (2) insentif investasi akan diberlakukan, (3) harmonisasi tarif akan diberlakukan, dan (4) konsistensi

dukungan dari pemerintah akan sulit ditebak, karena tergantung pada siapa Presidennya dan bagaimana karakter dan kompetensi anggota-anggota kabinetnya, bahkan sampai mengarah pada kondisi inkonsistensi dukungan pemerintah.

Skenario 1 (Tabel 2) tersebut, apabila terjadi di masa depan diperkirakan tetap kurang dapat memacu percepatan pengembangan industri hilir perkebunan pada masa 5 – 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemberlakuan insentif investasi dan harmonisasi tarif tetap perlu dipadu dengan penyempurnaan kebijakan PPN dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan.

Tabel 2. Beberapa Kemungkinan Kondisi Faktor di Masa Depan

Faktor		Kemungkinan Kondisi Faktor di Masa Depan		
PPN		Status quo		
Insentif Investasi	Akan diberlakukan			
Harmonisasi Tarif	Akan diberlakukan			
Konsistensi Dukungan Pemerintah		Tidak Konsisten	Sulit Diperkirakan	

Kebijakan Antisipatif Pengembangan

Beberapa usulan kebijakan untuk mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan di Indonesia, yang merupakan kesimpulan dari hasil *expert meeting* antara lain sebagai berikut.

Penyempurnaan Kebijakan PPN

- Untuk penyempurnaan kebijakan PPN, hendaknya dilakukan kebijakan satu pintu untuk restitusi PPN. Kebijakan satu pintu tersebut dimaksudkan untuk mengurangi biaya dan waktu pengurusan restitusi PPN (maksimum 1 bulan pemrosesan) sehingga tidak begitu mengganggu *cash flow* pelaku industri (produsen, pengolah, pedagang, eksportir). Restitusi PPN hendaknya tidak dikaitkan dengan PPH.
- PPN hendaknya dipungut di lini akhir, yaitu terhadap produk-produk hilir perkebunan yang dikonsumsi di pasar dalam negeri, bukan di setiap rantai penyerahan seperti sekarang ini. Apabila kebijakan ini dapat diberlakukan diperkirakan akan menumbuhkan para pelaku baru agroindustri hilir perkebunan.
- PPN pada industri yang kondisinya sedang memburuk hendaknya pemungutannya ditangguhkan. Apabila tetap dipungut, hendaknya hasil pemungutan PPN tersebut direlokasikan kembali ke industri tersebut, antara

lain industri teh, dalam bentuk program-program peningkatan daya saing industri teh nasional yang dikelola bersama oleh pemerintah, Asosiasi Teh Indonesia dan Asosiasi Petani Teh Indonesia.

Konsistensi Dukungan Pemerintah

Pemerintah hendaknya dapat membangun *grand strategy* pengembangan industri hilir perkebunan dengan legal aspek yang diterbitkan berupa Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah dan didukung oleh Peraturan Daerah dalam implementasinya. Dukungan terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan tersebut hendaknya secara jelas dituangkan pada Propenas. Bahkan perlu disebutkan secara spesifik lagi ke jenis industri hilir perkebunan yang memiliki prospek pasar yang baik dan nilai tambah tinggi. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi dukungan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang memiliki *grand strategy* pengembangan industri hilir perkebunan yang dituangkan dalam visi “Malaysia 2020”.

Pemberlakukan Insentif Investasi

Insentif investasi berupa insentif fiskal hendaknya diberikan kepada para pengusaha yang bermaksud membangun industri hilir baru yang belum berkembang di Indonesia atau yang meningkatkan kapasitas industri hilirnya. Untuk industri baru tersebut, pemerintah hendaknya memberlakukan beberapa instrumen kebijakan antara lain :

- *Tax holiday* untuk industri baru (*pioneer*) dan pengembangan industri hilir di wilayah tertentu
- Keringanan tarif impor untuk mesin-mesin dan alat-alat terutama untuk industri kecil dan menengah yang produknya dipasarkan untuk pasar ekspor maupun pasar domestik
- Insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh Ps 21) berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ditampung di industri kecil dan menengah
- Insentif pembebasan pajak iklan.
- Kemudahan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka mempercepat proses transfer teknologi pada industri baru untuk menggalang investasi, khususnya perluasan investasi. Hendaknya pemerintah memberikan kemudahan dalam efisiensi proses perizinan (waktu dan biaya) khususnya dalam pengurusan ijin lokasi, IMB, dan kemudahan dalam memproses analisis dampak lingkungan.

Pemberlakuan Harmonisasi Tarif

- Harmonisasi tarif perlu dilakukan pemerintah dengan menerapkan tarif proporsional sesuai kandungan produk dan dengan pengertian yang jelas sesuai dengan klasifikasi produk (*harmonized system*). Untuk tarif impor,

hendaknya pemerintah menerapkan prinsip pengenaan tarif yang lebih besar ke produk-produk hilir dibandingkan terhadap produk-produk hulunya. Pada produk teh, perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya tarif impor pada produk hulu (teh curah) dan produk hilirnya. Saat ini besarnya tarif impor untuk teh curah sama dengan produk-produk hilir teh yaitu semuanya dikenakan 5 persen. Usulan dari GAPMMI dan ATI untuk tarif impor produk-produk hilir teh adalah minimal 15 persen, sedangkan untuk teh curahnya tetap 5 persen. Untuk tarif ekspor, pengenaan tarif ekspor produk-produk hilir sawit hendaknya lebih kecil dibandingkan CPO atau PKO-nya dan bersifat progresif.

- Untuk mengetahui permainan tarif yang dilakukan oleh negara-negara pengimpor, pemerintah perlu memberdayakan aparat (atase) perdagangan di luar negeri.
- Penentuan tarif impor dan ekspor dapat dilakukan melalui metode kompromi dengan melibatkan para penentu kebijakan, ilmuwan, pengamat, dan asosiasi komoditas dan produk yang bersangkutan.

VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN

Dari hasil konfirmasi lapangan dengan responden terpilih, dihasilkan beberapa klarifikasi dan tambahan usulan kebijakan untuk mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan di Indonesia sebagai berikut.

Penyempurnaan Kebijakan PPN

- Dalam kaitannya dengan usulan kebijakan satu pintu untuk restitusi PPN. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, restitusi PPN dalam aturannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu, namun dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen pengurusan dari pihak pengusaha. Selain itu, restitusi PPN selalu dikaitkan dengan pelunasan PPh Ps 21 sehingga memerlukan waktu lebih panjang lagi.
- Usulan penarikan PPN pada lini akhir produk nampaknya memerlukan persiapan yang cukup lama karena harus merubah sistem secara keseluruhan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan. Aturan ini pernah dilakukan pada era tahun 1950-an, berdasarkan UU Pajak tahun 1951.
- Usulan reformasi perpajakan baik PPN, maupun harmonisasi tarif hendaknya disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama dengan departemen terkait.

- Usulan relokasi PPN untuk dikembalikan ke industri yang sedang bangkrut, tergantung pada mekanisme APBN.
- Menurut UU Pajak Tahun 1983, mekanisme realokasi pungutan pajak (PPN) untuk industri yang sedang bangkrut tidak dijumpai. Hal yang dapat ditempuh adalah revisi UU Pajak atau menerapkan kekecualian hukum dengan persetujuan DPR.
- Sehubungan dengan adanya usulan baru mengenai perlunya insentif pajak bagi penyerapan input yang berasal dari dalam negeri, maka usulan pengurangan *rate* atau besarnya PPN menjadi sangat relevan.

Konsistensi Dukungan Pemerintah

- Untuk memperkuat konsistensi dukungan pemerintah terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan, maka klausul dukungan terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan harus dituangkan secara tegas pada Proenas. Bahkan perlu disebutkan secara spesifik lagi ke jenis industri hilir perkebunan yang memiliki prospek pasar yang baik dan nilai tambah tinggi antara lain industri hilir sawit dan teh.
- Visi dan misi negara yang tertuang dalam Proenas harus konsisten dan lebih diperjelas. Selanjutnya visi dan misi negara tersebut harus dijabarkan secara spesifik di masing-masing departemen terkait.
- Untuk jenis industri hilir sawit, konsistensi dukungan pemerintah hendaknya diperluas tidak hanya untuk industri minyak goreng saja, tetapi diberikan juga ke berbagai jenis industri hilir sawit lainnya yang sangat prospektif.
- Perlu usulan restrukturisasi lembaga yang menangani industri sawit mulai dari CPO hingga derivatnya, seperti pembentukan *Malaysian Palm Oil Board* di Malaysia.
- Keamanan investasi perlu ditingkatkan, baik dalam konteks fisik maupun ekonomi, yaitu dalam bentuk kepastian hukum. Keamanan fisik dan ekonomi terutama dari gangguan satgas Organisasi Kepemudaan (OKP) yang mempraktekkan premanisme. Pungutan yang diambil oleh satgas tersebut sangat memberatkan karena mencapai 10 kali lipat dari pungutan-pungutan resmi (pajak dan retribusi)

Pemberlakuan Insentif Investasi

- Kebijakan investasi khususnya insentif (*tax holiday*, keringanan tarif impor, insentif keringanan PPh PS 21) merupakan wewenang Departemen Keuangan dan Ditjen Pajak. Selanjutnya wewenang Badan Investasi dan Promosi di masing-masing Provinsi adalah dalam pengaturan kebijakan prosedur perijinan investasi, dan efisiensi biaya perijinan (ijin lokasi, IMB, gangguan, dan lain-lain).

- Prosedur perijinan investasi sejak Otda sudah lebih sederhana karena memberikan opsi untuk mendapatkan ijin prinsip dimana saja baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun demikian tetap diperlukan standarisasi pelayanan terutama tentang perijinan (ijin usaha tetap/IUT dan perluasan/IUP) baik yang menyangkut biaya maupun waktu.
- Efisiensi biaya dapat dilakukan melalui percepatan pelayanan dan penetapan biaya serendah-rendahnya melalui persaingan tarif perijinan investasi antar provinsi dan kabupaten untuk menggalang investasi.
- Untuk menggalang investasi, di samping dilakukan upaya-upaya promosi, dilakukan juga peningkatan mutu pelayanan khususnya perizinan dan pendirian kawasan industri dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada investor.
- Karena sifat industri hilir sawit yang padat modal dan teknologi, maka diperlukan fasilitas dan insentif khusus (misalnya dalam bentuk *tax exemption* seperti *exemption of income tax for 5 years*, *import duties tariff reduction* untuk mesin-mesin tertentu, *investment tax allowance*, *reinvestment allowance*) selama periode konstruksi dan tahap awal komersialisasi industri khususnya industri pionir.
- Diperlukan dukungan finansial khusus, misalnya kredit investasi khusus untuk pengembangan industri hilir perkebunan seperti halnya pemberian kredit PBSN I-III pada masa lalu dengan menggunakan kredit likuiditas dari Bank Indonesia.
- Diperlukan peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, ketersediaan listrik, air, dan jaringan kereta api.
- Diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (teknisi, operator, dan pekerja laboratorium) antara lain melalui training dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah bersama swasta perlu mengembangkan pusat-pusat training, dengan fasilitas yang baik dan instruktur yang kompeten.
- Diperlukan fasilitas penyediaan informasi dan promosi pasar.
- Diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan yang kuat melalui kerjasama antara lembaga penelitian pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian swasta. Penelitian pasar merupakan faktor yang menentukan terutama untuk pasar produk-produk baru. Demikian pula diperlukan sistem insentif dan penghargaan untuk menarik orang-orang kreatif bekerja di litbang.
- Kredit ekspor perlu disediakan oleh pemerintah. Kredit ekspor ini diperlukan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan produk jadi berbasis teh dan CPO.

- Perlu diberikan insentif investasi berupa pengurangan retribusi produk, tenaga kerja, dan pungutan-pungutan lainnya untuk memenuhi kewajiban memperoleh sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- Perlu diberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa penetapan NJOP berdasarkan harga pada saat terjadi proses jual beli tanah dan bangunan.

Pemberlakuan Harmonisasi Tarif.

- Untuk mengetahui permainan tarif yang dilakukan oleh negara-negara pengimpor, pemerintah perlu memberdayakan aparat (atase) perdagangan di luar negeri
- Penentuan tarif impor dan ekspor dapat dilakukan melalui metode kompromi dengan melibatkan para penentu kebijakan, ilmuwan, pengamat, dan asosiasi komoditas dan produk yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Terdapat 10 faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan yakni (1) penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen; (2) insentif investasi; (3) penerapan kebijakan harmonisasi tarif bagi produk hilir dan bahan bakunya; (4) konsistensi dukungan pemerintah; (5) efisiensi biaya produksi; (6) jaminan keamanan investasi; (7) penelitian pasar; (8) kualitas bahan baku dan bahan penolong; (9) respon sosial; dan (10) *supply chain management* dan infrastruktur.
2. Dari 10 faktor yang berpengaruh terhadap percepatan industri hilir perkebunan tersebut, ternyata hanya terdapat 4 faktor kunci yaitu (1) PPN, (2) insentif investasi, (3) harmonisasi tarif, dan (4) konsistensi dukungan pemerintah, yang merupakan faktor kunci karena memiliki pengaruh total yang tertinggi namun ketergantungannya pada faktor lain yang rendah.
3. Skenario yang paling mungkin terjadi di masa 5 – 10 tahun mendatang adalah skenario dimana akan terjadi kondisi (1) PPN akan tetap dipungut seperti sekarang atau tidak ada perubahan terhadap kebijakan PPN (*status quo*), (2) insentif investasi akan diberlakukan, (3) harmonisasi tarif akan diberlakukan, dan (4) konsistensi dukungan dari pemerintah akan sulit ditebak karena tergantung pada siapa presidennya bahkan sampai mengarah pada kondisi inkonsistensi dukungan pemerintah.

4. Apabila skenario tersebut betul-betul terjadi di masa depan, diperkirakan akan kurang dapat memacu percepatan pengembangan industri hilir perkebunan pada masa 5–10 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemberlakuan insentif investasi dan harmonisasi tarif tetap perlu dipadu dengan penyempurnaan kebijakan PPN dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan.

Saran Kebijakan

1. Hendaknya dilakukan kebijakan satu pintu untuk restitusi PPN untuk mengurangi biaya dan waktu pengurusan restitusi sehingga tidak mengganggu *cash flow*. Restitusi PPN hendaknya tidak dikaitkan dengan Pajak Penghasilan. PPN hendaknya dipungut di lini akhir yaitu terhadap produk-produk hilir perkebunan yang dikonsumsi di pasar dalam negeri. Pada industri yang kondisinya sedang memburuk seperti teh hendaknya PPN dikenakan 0 persen.
2. Pemerintah hendaknya dapat menuangkan secara jelas *grand strategy* pengembangan industri hilir perkebunan dalam Propenas. Pemerintah hendaknya juga memberikan pelayanan dan kemudahan dalam efisiensi proses perizinan (waktu dan biaya) khususnya dalam pengurusan izin lokasi, dan kemudahan dalam memproses analisis dampak lingkungan.
3. Insentif investasi berupa insentif fiskal hendaknya diberikan kepada para pengusaha yang bermaksud membangun industri hilir baru (*pioneer*) di Indonesia antara lain dalam bentuk *tax holiday*, keringanan tarif impor untuk mesin dan alat-alat terutama untuk industri kecil dan menengah, insentif pembebasan pajak penghasilan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ditampung, insentif keringanan pajak iklan, dan kemudahan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka mempercepat proses transfer teknologi pada industri baru.
4. Harmonisasi tarif perlu dilakukan pemerintah dengan menerapkan tarif proporsional sesuai kandungan produk, menerapkan prinsip pengenaan tarif masuk yang lebih besar ke produk-produk hilir dibandingkan terhadap produk-produk hulunya, khususnya untuk teh. Usulan dari GAPMMI dan ATI hendaknya tarif masuk untuk produk-produk hilir teh adalah minimal 15 persen, sedangkan untuk teh curahnya tetap 5 persen. Untuk tarif ekspor, pengenaan tarif ekspor produk-produk hilir sawit hendaknya lebih kecil dibandingkan bahan bakunya dan bersifat progresif. Untuk mengetahui permainan tarif yang dilakukan oleh negara-negara pengimpor, pemerintah perlu memberdayakan aparat (*atase*) perdagangan di luar negeri dan melakukan pendekatan serta perjanjian bilateral. Penentuan tarif impor dan ekspor dapat dilakukan melalui metode kompromi dengan melibatkan para penentu kebijakan, pakar, pengamat, dan asosiasi komoditas dan produk yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardjanggi, S. 1987. Pengembangan agroindustri dalam rangka pola pengembangan industri nasional. Makalah Simposium Nasional Agroindustri II di Bogor tanggal 30-31 Januari 1987.
- Baharsyah, S. 1991. Peranan dan prospek agribisnis dalam pembangunan di sector pertanian. Sambutan Menteri Muda Pertanian tentang Agroindustri dan Agribisnis, Departemen Pertanian.
- CRIEC. 2002. Prospective Analysis Report. Studies on Smallholder Tree Crops Production and Poverty Alleviation. Bogor, 20 - 21 February 2002. Central Research Institute for Estate Crops.
- Gumbira-Sa'id, E. 2001. Penerapan Manajemen Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Global Produk Agribisnis/Agroindustri Berorientasi Produksi Berkelanjutan. Orasi Ilmiah Guru Besar Teknologi Industri Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Harahap, H. 1987. Pengembangan perkebunan/agribisnis dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. Makalah Lokakarya Kebijakan Nasional Komoditi Pertanian di Jakarta tanggal 28-29 Oktober 1987.
- Honggokusumo, S. 1994. Perkembangan Industri Barang Jadi Karet di Indonesia. Pusat Penelitian Karet, Sungei Putih.
- Ibnusantoso, G. 2000. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengembangan Industri Hilir Perkebunan *dalam* Herman (Eds). Prosiding Seminar Kebijakan Industri Hilir Perkebunan. Jakarta 14 September 2000. Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor.
- Lubis, A.U. dan P.M. Naibaho. 1995. Prospek Pengembangan Industri Hilir Pengolahan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan.
- Suprihatini, R. dan K. Bambang. 2000. Laporan Akhir Kajian Manajemen Alih Teknologi Pengolahan Produk Hilir Teh. Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia.
- Suprihatini, R. Herawan, M. Sinurat, dan D. Suparto. 2000. Analisis Prospek dan Strategi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit. Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia.
- Suprihatini, R. dan E. Gumbira Sa'id. 2001. Daya saing produk asam lemak Indonesia. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 11 (1), p : 35 - 42.
- Suprihatini, R. 2001. Perkembangan dan prospek produk glycerol alami. Tjauan Komoditas Perkebunan. Kelapa Sawit, Karet, Gula, Kopi, Kakao dan teh. Vol.2 (2), p : 81 - 87.
- Suratin, S., R. Dereinda, dan W.R. Susila. 1993. Alternatif pengembangan dan upaya peningkatan penguasaan teknologi agroindustri. Makalah Dialog Teknologi dan Industri'93 dalam rangka 15 Tahun BPP Teknologi di Jakarta tanggal 9-13 Agustus 1993.